

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. (Syahyuti, 2006: 95). Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma neo-liberal ini digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini (Suharto, 2002). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu Negara. Pengukuran

kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” (Edi Suharto, 2009,138)

Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan (Satterthwaite (1997). Hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk-bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya akar permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan juga tidak dapat ditemukan. Namun memang pendekatan *income poverty* ini lebih mudah dilihat dan dikaji karena langsung dapat terukur, serta sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan structural (cheyne, O’Brien dan Belgrave (1998:79). Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. (cheyne, O’Brien dan Belgrave (1998:79).

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006 : 95). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disini lah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap

individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

Perbedaan kedua paradigma tersebut dalam melihat kemiskinan maupun penyelesaian masalah kemiskinan sangat terlihat, baik dalam merumuskan penyebab maupun memberikan alternative solusi mengatasi kemiskinan, seperti terlihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Teori Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial tentang Kemiskinan

Paradigma	Neo-Liberal	Demokrasi-Sosial
Landasan Teoritis	Individual	Struktural
Konsepsi dan Indikator Kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab Kemiskinan	Kelemahan dan pilihan-pilihan individu, lemahnya pengaturan pendapatan, lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh)	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik, ketidakadilan sosial
Strategi Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif - Memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran pendapatan dasar secara universal - Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi Negara dan kebijakan sosial

Sumber : dikembangkan dari Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998;176)

3. Keberfungsian Sosial

Kedua pendekatan diatas memiliki kelemahan, oleh karenanya timbul pendekatan lainnya untuk menutupi kelemahan tersebut, yaitu pendekatan keberfungsian sosial. Pendekatan ketiga ini lebih mengarah pada pendekatan demokrasi sosial (Edi Suharto 2009). Pendekatan ini menekankan pada cara yang dilakukan individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial dilingkungannya. Salah satunya teori yang mendukung paradigm keberfungsian sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Baker, Dubois, dan Miley (1992). Teori tersebut menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini individu dianggap sebagai subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Sehingga setiap individu memiliki dan atau dapat

menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya.

Pendekatan ini memandang kelompok miskin bukan sebagai objek yang pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Kelompok miskin bagi pendekatan ini adalah individu yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Melalui pendekatan ini dapat dijelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Serta bagaimana struktur rumah tangga, keluarga, kekerabatan, dan jaringan sosial mempengaruhi kehidupan orang miskin. Pendekatan ini lebih menekankan pada apa yang dimiliki si miskin dan bukan pada apa yang tidak dimiliki si miskin.

Untuk mempelajari kemiskinan, pendekatan keberfungsian sosial menekankan pada empat point yaitu (Edi Suharto 2009):

1. Kemiskinan sebaiknya dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. Pada point pertama ini juga termasuk efektivitas jaringan sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya, dimana jaringan sosial yang dimaksud termasuk pula lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat.
2. Menggunakan indikator komposit untuk mengukur kemiskinan, dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dan jaringan sosial yang ada disekitarnya
3. Lebih menekankan pada konsep kemampuan sosial dari pada hanya pada konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan
4. Kemampuan sosial keluarga miskin difokuskan pada beberapa indikator kunci, yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*). Sedangkan indikator kunci untuk mengukur

jaringan sosial mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial memperoleh sumber daya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola asset, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program anti-kemiskinan, dan peran dalam menghadapi goncangan dan tekanan sosial.

Paradigma ini lebih lengkap dibandingkan dua paradigme sebelumnya karena selain menekankan pada institusi paradigme ini juga tidak melupakan kemampuan individu dalam mengatasi masalah kemiskinannya. Pada paradigme ini kelompok miskin tidak dianggap pasif namun dianggap memiliki kemampuan dan potensi dalam mengatasi kemiskinannya, dibantu dengan kemampuan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat. Gabungan kemampuan institusi dan individu ini akan membuat kajian mengenai kemiskinan yang dialami suatu kelompok menjadi lebih lengkap.

Berdasarkan tiga paradigme tersebut maka penelitian ini lebih menggunakan paradigme keberfungsian sosial. Hal ini dikarenakan melalui pendekatan ini diharapkan akan bisa dilihat secara lebih realistis dan komprehensif mengenai rumah tangga petani miskin. Alasan lainnya memilih pendekatan ini adalah karena pendekatan keberfungsian sosial lebih memandang individu sebagai subyek dari setiap aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu setiap individu termasuk petani miskin harus dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya.

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Pengertian kemiskinan umumnya selalu dikaitkan hanya dengan sektor ekonomi semata. Padahal kemiskinan bisa dilihat dari sisi sosial maupun budaya masyarakat. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002).

Dimensi Kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu :

1. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.
2. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.
3. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. (Indra, kompas online, 2007). Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun

temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Ketiga dimensi menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan tidak lah tunggal, bisa berasal dari kondisi alam yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, seperti yang diperlihatkan kemiskinan alamiah. Namun bisa juga kemiskinan disebabkan karena faktor manusianya, seperti yang digambarkan pada kemiskinan secara kultural, bahkan bisa juga karena kondisi yang dibentuk oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam masyarakat, seperti diperlihatkan dimensi kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dialami oleh petani diperdesaan selain karena rendahnya kualitas sumber daya manusia juga karena struktur dan kebijakan sektor pertanian yang kurang mengembangkan sektor pertanian. kemiskinan struktural di wilayah perdesaan umumnya dialami oleh para petani yang tidak memiliki lahan atau buruh tani dan buruh penggarap dimana hasil pertaniannya tidak mencukupi untuk memberi makan dirinya dan keluarganya. (Soedjatmoko, 1980 ; 46-61)

Adanya kemiskinan struktural dalam masyarakat dapat dilihat melalui beberapa karakteristik dari kemiskinan structural itu sendiri. Ciri pertama yang mudah dilihat adalah tidak terjadinya mobilitas sosial secara vertikal, jika pun terjadi prosesnya berjalan sangat lamban. Tidak terjadinya mobilitas secara vertikal menyebabkan kelompok yang miskin tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan kelompok yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Kondisi ini disebabkan karena adanya kungkungan struktural yang membuat tidak adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Kungkungan struktural tersebut telah membentuk berbagai rintangan bagi kelompok miskin, sebagai contoh adalah mahalnya biaya pendidikan menyebabkan kelompok miskin tidak bisa mencapai pendidikan yang tinggi untuk bisa melepaskan diri dari jerat kemiskinan.

Ciri lain dari keberadaan kemiskinan struktural adalah adanya ketergantungan yang tinggi kelompok miskin terhadap kelompok sosial di atasnya. Ketergantungan ini yang mengurangi kemampuan kelompok miskin untuk memiliki *bargaining* posisi dalam hubungan sosial yang memang telah timpang, misalnya antara pemilik tanah dengan petani penggarap atau buruh tani. Para petani penggarap tak bisa menentukan bagaimana pembagian hasilnya, buruh tani

tak dapat menentukan berapa upahnya, semuanya tergantung pada pemilik tanah. Pada kondisi seperti ini kelompok yang lebih rendah relatif tidak dapat memperbaiki kehidupannya.

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan (Cox 2004 ; 1-6), yaitu :

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan
3. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi
4. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

Dimensi yang dikemukakan oleh Cox ini jauh lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Hal ini dikarenakan Cox memasukan

dimensi globalisasi sebagai salah satu dimensi. Melalui dimensi ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di suatu negara dapat disebabkan oleh pola perekonomian dunia. Perekonomian dunia juga dapat memberikan pengaruh pada pola pembangunan di dalam suatu negara. Dimana pembangunan itu sendiri dapat menjadi sumber penyebab kemiskinan bila pola pembangunan yang diterapkan tidak seimbang untuk setiap wilayah.

Kemiskinan yang dialami individu atau rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tingkat kesejahteraannya. Adanya kemiskinan dalam suatu masyarakat merupakan tanda dari tidak tercapainya kesejahteraan individu atau rumah tangga. Untuk melihat tingkat kesejahteraan tersebut ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu (Zastrow, 2000;237) :

1. Pendekatan Absolut, pendekatan ini melihat pada batas minimum yang harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan minimum suatu keluarga. Suatu keluarga dikatakan miskin bila tidak mempunyai penghasilan atau tidak mencapai batas minimum yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui jumlah keluarga miskin. Dengan batas minimum yang sama maka akan dapat diperbandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Kelemahan pendekatan ini adalah pada kenyataan bahwa kebutuhan setiap keluarga tidak akan sama, karena tergantung pada waktu dan tempat. Kemiskinan sangat terkait dengan kondisi-kondisi dimasyarakatnya. Namun demikian pendekatan ini masih banyak digunakan terutama terkait dengan perbandingan jumlah penduduk miskin.
2. Pendekatan Relatif, pendekatan ini membandingkan antara pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan rata-rata pendapatan populasi. Pendekatan ini lebih melihat pada ketidakseimbangan pendapatan. Selama ketidakseimbangan pendapatan ada maka kemiskinan akan tetap ada. Pendekatan ini sudah mengakomodasi bahwa kemiskinan tidak akan sama di semua tempat, namun pendekatan ini justru tidak dapat menunjukkan seberapa buruk atau seberapa baik orang mendistribusikan pendapatan dalam kehidupan nyata.
3. Pendekatan Kebutuhan Dasar, pendekatan yang dikemukakan oleh Townsend menekankan pada dua unsur penting, (eksiklopedi ilmu-ilmu sosial, 2000),

yaitu: *pertama*, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi pendapatan yang tidak dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan subsisten akan pangan, papan, pakaian, dan barang-barang rumah tangga tertentu. *Kedua*, pendapatan tersebut juga tidak dapat memenuhi jasa-jasa penting lainnya, seperti air minum yang aman, sanitasi, transportasi umum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pendekatan ini lebih lengkap dibanding dua pendekatan sebelumnya, karena lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan, dimana hal tersebut berbeda-beda tergantung pada tempat dan waktu.

Definisi kemiskinan yang digunakan dalam melihat peningkatan pendapatan rumah tangga petani miskin adalah kemiskinan struktural dengan pendekatan kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan kondisi kemiskinan yang dialami petani tidak terlepas dari kebijakan pembangunan khususnya sektor pertanian yang diterapkan oleh pemerintah, dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pendekatan yang lebih bisa menggambarkan secara menyeluruh kondisi kemiskinan yang dialami petani.

Berkaitan dengan kemiskinan struktural dalam rumah tangga petani maka salah satu sumber daya dalam rumah tangga yang juga mengalami kemiskinan struktural adalah perempuan sebagai istri maupun anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruspini dalam *longitudinal research in the social sciences*, ditemukan bahwa kemiskinan struktural telah menyebabkan ketergantungan, pengabaian sosial (*social exclusion*), dan ketiadaan akses bagi perempuan dalam perubahan-perubahan sosial. Kondisi tersebut berakar pada tiga sistem utama (Ruspini, 2000), yaitu :

1. Ruang privat rumah tangga. Kekuasaan dalam rumah tangga dan keluarga erat kaitannya dengan kontrol terhadap sumber keuangan dan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Umumnya laki-laki atau suami memiliki akses yang lebih besar terhadap dunia kerja sementara perempuan lebih diarahkan untuk mengelola sektor keluarga yang tidak produktif. Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan pun tidak dialami secara merata dalam keluarga. Keluarga-keluarga yang lebih miskin biasanya menyerahkan pengelolaan keuangannya pada perempuan, sementara keuangan keluarga dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik selalu berada dibawah kontrol

laki-laki. Studi yang lain menunjukkan perempuan yang memiliki beban untuk menjaga kehidupan keluarga biasanya mengutamakan pembagian bagi anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Dalam situasi ketika sumber daya sangat terbatas, perempuan terpaksa mengkonsumsi sisa-sisa pembagian tersebut. Tak mengherankan jika kualitas hidup perempuan lebih buruk dari laki-laki dalam keluarga.

2. Dalam pembagian kerja secara seksual perempuan lebih banyak mengerjakan tugas-tugas yang tersembunyi dan tidak dibayar. Perempuan adalah kelas kedua dalam susunan pasar kerja. Sementara kehidupan perempuan dibentuk oleh tanggung jawabnya terhadap keluarga baik ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibayar maupun tidak. Itulah sebabnya meskipun perempuan telah bekerja disektor-sektor produktif perempuan tetap terbebani oleh tanggungjawab moral untuk mendedikasikan hasil kerjanya pada keluarga.
3. Dampak Negatif globalisasi telah menciptakan sistem ekonomi yang terintegrasi dalam sebuah pasar dunia. Sistem ekonomi menjadi lebih banyak mengabaikan program-program kesejahteraan, mengurangi pengeluaran-pengeluaran untuk masyarakat, dan menekan biaya kesejahteraan keluarga. Kondisi ini menyebabkan beban tambahan bagi perempuan karena kesejahteraan keluarga kemudian menjadi beban yang harus diatasi oleh perempuan dengan dana terbatas.

Penjelasan Ruspini menggambarkan secara jelas bahwa perempuan merupakan kelompok yang dibentuk menjadi kelompok miskin dalam masyarakat. Bukan hanya komunitasnya, negara, bahkan dunia telah mempengaruhi posisi marginal dari perempuan. Perempuan dalam rumah tangga miskin di desa juga tidak terlepas dari tiga sistem tersebut. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya dalam keluarga miskin padahal perempuan merupakan salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani miskin.

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Harniati, 2010). Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

- Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahal biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
- Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahal biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
- Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
- Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
- Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
- Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan

penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.

- Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
- Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
- Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
- Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Bappenas mencakup keseluruhan aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kemiskinan, namun indikator-indikator ini masih sangat umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci yang bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang dikemukakan oleh Komite penanggulangan Kemiskinan (KPK) jauh lebih spesifik dalam melihat kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat. (Syahyuti, 2006 : 95). Keluarga miskin menurut komite ini adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini, yaitu :

- Paling kurang sekali seminggu makan daging, ikan, dan telur
- Sekali setahun seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru,
- Lantai rumah paling kurang 8 m² perpendhuni

Sedangkan kategori keluarga miskin sekali adalah jika keluarga tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini:

- Seluruh anggota keluarga umumnya makan dua kali sehari atau lebih
- Memiliki pakain berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah, dan berpergian
- Bagian lantai terluas bukan dari tanah

Kondisi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat berbeda beda atau bersifat heterogen, oleh karena itu perlu dilakukan tingkatan untuk dapat mengetahui kondisi terparah dari kemiskinan. Tingkatan dari kondisi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan (Sahyuti, 2006 : 95), yaitu :

1. Kelompok yang paling miskin (*destitute*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, tidak memiliki sumber pendapatan, dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar
3. Kelompok Rentan (*vulnerable group*) merupakan kelompok miskin yang memiliki kehidupan yang lebih baik, namun mereka rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya.

Tingkatan kondisi kemiskinan juga digunakan dalam survey masyarakat miskin daerah perkotaan di DKI Jakarta dan Surabaya (Suharso, 1994, proyek INS/94/007). Tingkatan yang digunakan dalam survey tersebut adalah :

- Tingkat pertama atau paling bawah adalah kelompok yang hanya mampu menyediakan makan satu kali sehari, hanya memiliki pakaian paling banyak dua stel untuk segala jenis kegiatan, belum mampu memiliki ataupun menyewa rumah tinggal meskipun lantainya maksimal masih dibawah 15m², tidak mampu membiayai sekolah anaknya, meskipun hanya tingkat sekolah dasar dan bilamana anggota keluarga ada yang jatuh sakit baru dibawa berobat ke puskesmas bila sudah parah
- Tingkat Kedua atau tingkatan selanjutnya merupakan tingkatan bagi kelompok yang mampu menyediakan makan dua kali sehari, memiliki pakaian lebih dari 2 stel ditambah minimal satu stel pakaian lainnya untuk kondangan ataupun untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, mampu menyewa rumah tinggal sendiri, meskipun dengan luas lantai kurang dari 15 m², mampu membiayai sekolah anaknya sampai sekolah dasar, dan mampu membawa anggota keluarga langsung ke puskesmas bila ada yang sakit

- Tingkatan ketiga atau tingkatan kemiskinan paling tinggi, merupakan kelompok miskin yang mampu menyediakan makan tiga kali sehari, pakaian yang dimiliki lebih dari dua stel ditambah minimal satu stel pakaian lainnya untuk kondangan atau kegiatan kemasyarakatan lainnya, mampu memiliki rumah tangga sendiri, meskipun dengan luas lantai kurang dari 15 m², mampu menyekolahkan anaknya sampai tingkat SLTP, dan mampu membawa anggota keluarganya yang sakit langsung ke dokter praktek atau rumah sakit
- Tingkatan selanjutnya kondisi tidak miskin yang merupakan kelompok yang kemampuan ekonominya melebihi kemampuan dari kelompok miskin pada tingkatan ketiga.

Pada dua bentuk pengelompokan tingkatan kemiskinan terlihat ada perbedaan indikator yang digunakan, pada tingkatan kemiskinan yang dikemukakan oleh Sahyuti lebih berfokus pada tingkatan pendapatan, dan akses pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan tingkat kemiskinan yang dibuat dalam survey masyarakat perkotaan mengacu pada kemampuan ekonomi rumah tangga petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penelitian ini ingin melihat pada kemampuan ekonomi rumah tangga petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga indikator yang cenderung lebih digunakan untuk tingkatan kemiskinan adalah indikator yang digunakan survey masyarakat perkotaan, yang tentunya penggunaan indikator tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa.

2.2 Teori Pertanian

Ilmu pertanian dapat didefinisikan sebagai aktivitas memproduksi tanaman dan ternak dari sumber daya alam. Dengan bahasa yang berbeda pertanian dapat dikatakan sebagai suatu produksi biologis untuk menghasilkan berbagai kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan (Syahyuti, 2006 : 95) Sebagai salah satu aspek pembangunan, pertanian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep revolusi hijau. Konsep revolusi hijau dalam pembangunan Indonesia merupakan strategi pembangunan tentang penggunaan dan pemanfaatan tanpa *landreform*.

Secara lebih rinci revolusi hijau adalah peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi, peningkatan dosis dan ragam jenis pupuk, penggunaan obat-obatan, mekanisasi pertanian, dan penerapan berbagai teknik pertanian lainnya. Tujuan dari penggunaan teknologi secara efisien ini adalah untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Revolusi hijau dalam pembangunan pertanian ternyata telah berlangsung cukup lama dan bukan hanya di Indonesia tetapi juga berlangsung di berbagai belahan dunia yang bertujuan membantu negara-negara berkembang mencukupi kebutuhan pangannya.

Penerapan konsep revolusi hijau dalam pembangunan sektor pertanian sesungguhnya bertujuan pula untuk meningkatkan pendapatan petani. Namun karena persoalan petani di Indonesia khususnya pulau Jawa lebih pada rendahnya kepemilikan lahan, maka peningkatan pendapatan petani belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani. Penekanan pada penggunaan teknologi pertanian juga berpengaruh pada peningkatan biaya produksi, dan penghapusan cara-cara tradisional. Keadaan ini seringkali menyebabkan pendapatan yang diperoleh menjadi rendah akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan.

Individu yang bekerja di sektor pertanian, dimana sebagian besar penghasilnya berasal dari sektor pertanian disebut dengan petani. Sebutan petani ini secara statistik memiliki bias karena semua individu yang meskipun hanya bekerja satu jam dalam seminggu dapat disebut sebagai petani. Sebutan petani ini juga diberikan untuk individu yang tinggal di perdesaan dan bagi mereka yang menggunakan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini mengakibatkan jumlah individu yang bekerja di pertanian menjadi banyak, dan menjadi sebab rendahnya angka produktivitas pada sektor pertanian, akibat besarnya jumlah petani sebagai pembagi dalam perhitungan produktivitas.

Istilah petani dalam bahasa Inggris diterjemahkan kedalam dua istilah yaitu *peasant* dan *farmer* (Syahyuti, 2006). Kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda, dan dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian maka perubahan yang diharapkan terjadi adalah transformasi dari *peasant* ke *farmer*. Hal ini dikarenakan *peasant* merupakan gambaran dari petani yang subsisten

sedangkan *farmer* adalah petani komersial yang berusaha tani dengan menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntutan agribisnis.

Peasant atau dalam istilah lainnya disebut petani *subsistence* adalah individu dimana aktivitas usaha pertaniannya semata-mata hanya untuk konsumsi sendiri atau untuk kebutuhan rumah tangganya. Jika pun ada sisa maka yang akan dijual ke pasar lebih sedikit dari yang dikonsumsi, hal ini tentunya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Kelompok petani ini tidak terlalu berhubungan dengan pasar, menggunakan teknologi yang terbatas, memiliki keterbatasan finansial dan keterbatasan kemampuan manajemen. Kelompok petani ini merupakan kelas petani yang meliputi petani kecil, penyewa (*tenants*), penggarap (*sharecroppers*), dan buruh tani. Kelompok ini meskipun berada dibagian bawah dari stratifikasi petani namun memiliki peranan penting dalam proses pertanian. Petani subsisten menjalin hubungan patron klien dalam aktivitas pertanian, dimana petani kaya adalah patron dan petani subsisten adalah klien yang ada dalam posisi ter subordinasi.

Sedangkan *Farmer* atau petani komersial adalah individu dimana aktivitas pertaniannya memberikan keuntungan dan merupakan sumber utama pendapatan keluarganya. Kelompok ini menggunakan teknologi dalam aktivitas pertaniannya, memiliki kemampuan finansial dan manajemen dalam mengelola hasil pertaniannya. Kelompok petani ini menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar baik nasional maupun internasional. Petani komersial ini tentunya memiliki pendapatan yang besar karena mengutamakan perolehan keuntungan pada setiap aktivitas pertaniannya.

Melihat dari karakteristik antara *peasant* dan *farmer* maka petani di Indonesia masih lebih banyak sebagai *peasant* dibandingkan dengan *farmer*. Kondisi ini diperkuat dengan perubahan kepemilikan lahan pertanian yang kini lebih banyak dimiliki oleh orang kota, sehingga petani di desa terutama di pulau Jawa lebih banyak sebagai petani penggarap atau buruh tani dibandingkan dengan petani pemilik. Ciri lain yang memperlihatkan petani di Indonesia sebagai *peasant* adalah adanya hubungan Patron Klien. Jalinan ini merupakan sebuah pertukaran hubungan antara dua peran yang terutama melibatkan persahabatan

instrumental, dimana individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan kepada seseorang yang berstatus lebih rendah (klien). Sedangkan klien membalasnya dengan menawarkan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron (scott, 1993 :7).

Hubungan Patron Klien bersifat khusus, tersebar, informal, cenderung lebih spesifik dan kontekstual. Meskipun sifatnya lebih cenderung tradisional namun hubungan patron klien berfungsi sebagai sebuah rumus untuk menyatukan individu-individu yang bukan dari satu kerabat atau keluarga. Hubungan ini tidak hanya mempersoal ketergantungan antara kedua peran tetapi harus dianalisa sebagai suatu jenis ikatan sosial yang mungkin dominan dalam kondisi-kondisi tertentu dan bersifat marginal bagi kondisi lainnya. Bagi pertanian di Indonesia hubungan ini masih bersifat dominan dilihat dari penggunaan buruh tani dalam setiap aktivitas pertaniannya.

Pada hubungan tersebut, patron berada dalam posisi yang lebih unggul, karena peran patron adalah mengendalikan barang dan jasa vital yang tidak mudah diperoleh di tempat lain. Sebaliknya klien berada pada posisi yang relatif lebih baik jika elite agraris merasa penting untuk mempertahankan hubungan dengan klien. Hubungan ini diperlukan bagi adanya jaminan tenaga kerja permanen dan dapat diandalkan dengan upah tunai tertentu, atau sebagai jaminan kebutuhan akan pasok tenaga kerja yang cukup untuk mempertahankan posisi patron. Disini terjadi neraca pertukaran tertentu dalam hubungan patron klien yang mencerminkan posisi tawar menawar relatif dari kedua belah pihak.

Beberapa faktor yang dapat melemahkan hubungan patron klien (Scott, 1993;9-10), adalah terjadinya diferensiasi sosial di dalam desa yang acuannya dari luar desa. Persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah dapat memperkuat ikatan patron klien. Hal ini dikerenakan ketergantungan buruh tani menjadi semakin kuat pada hubungan kerja atas tanah, tetapi dapat pula mengakibatkan lemahnya hubungan patron klien karena terjadinya pengusuran buruh tani atau buruh tani makin banyak yang tidak berpatron lagi. Kelompok masyarakat desa yang kemudian tidak lagi memiliki patron dan sumber daya alternatif, bila tidak

mendapatkan mekanisme strategi adaptasi yang tepat justru dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan.

Pola produksi pertanian menurut Todaro (2006) dapat diidentifikasi dalam tiga tahap, yaitu :

1. Usaha tani subsisten murni, merupakan usaha tani yang paling primitif, berskala kecil, dengan tingkat produktivitas yang rendah
2. Pola pertanian keluarga campuran atau yang telah terdiversifikasi, pada usaha tani ini, hasil usaha tani digunakan untuk konsumsi pribadi, dan sebagian dijual ke pasar.
3. Usaha pertanian modern, merupakan usaha tani yang secara khusus sudah mengarah pada usaha-usaha perdagangan dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan telah terspesialisasi.

Sedangkan untuk modernisasi pertanian dijelaskan oleh Todaro (2006) sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap tetapi berkesinambungan. Proses modernisasi pertanian terjadi dari pola produksi subsisten menjadi pola produksi yang terdiversifikasi dan terspesialisasi. Pola perubahan tersebut juga mencakup penyesuaian struktur pertanian dalam rangka memenuhi tuntutan dan permintaan bahan pangan, perubahan struktur sosial, politik dan kelembagaan masyarakat perdesaan. Tanpa perubahan yang menyeluruh hanya akan memunculkan ketimpangan antara pemilik lahan luas yang kaya dan berkuasa dengan para petani kecil penyewa, penggarap, dan yang tidak memiliki lahan sama sekali (Todaro, 2006)

Penjelasan Todaro tersebut memperlihatkan bahwa persoalan peningkatan produktivitas petani tidak dapat hanya dilakukan pada petani saja tanpa melibatkan perubahan pada masyarakatnya. Oleh karena itu penyelesaian masalah kemiskinan yang dialami petani pun harus menyeluruh meliputi seluruh kehidupan sosial masyarakat perdesaan. Pemahaman ini lebih melihat kemiskinan petani sebagai bentuk kemiskinan struktural dimana penyelesaiannya pun dengan memperbaiki struktur sosial masyarakat desa.

Penelitian ini lebih melihat pada petani subsisten, hal ini dikarenakan rumah tangga petani miskin di pulau Jawa lebih cenderung memiliki karakteristik *peasant* dibandingkan *farmer* dalam melakukan aktivitas

pertaniannya. Hubungan patron klien juga merupakan salah satu hal yang akan dilihat dalam aktivitas pertanian pada penelitian ini, mengingat hubungan ini sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh petani baik melalui upah buruh tani maupun dari pembagian hasil garapan.

Hal lain yang juga penting diperhatikan dalam aktivitas pertanian di Indonesia adalah peran perempuan perdesaan. Peran perempuan perdesaan dalam pertanian dan produksi pangan sesungguhnya sangat penting. Hal ini dikarenakan perempuan dalam aktivitas pertanian berperan pada hampir semua tahapan proses pertanian mulai dari menyiapkan bibit, persemaian, penanaman, perawatan dan pemanenan, bahkan dapat pula terlibat pada pemasarannya. (Asih Farmia, 2006) Besarnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas pertanian lebih disebabkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang besar terhadap keluarga, terutama dalam mengatasi persoalan pangan keluarga dan upaya peningkatan pendapatan. Keadaan inilah yang menyebabkan perempuan menjadi sumber daya utama dalam menopang ekonomi rumah tangga petani miskin di perdesaan.

Di sektor pertanian, perempuan yang ikut bekerja pada aktivitas pertanian seringkali tidak dianggap berprofesi sebagai “petani”, tetapi hanya sebagai isteri atau anggota keluarga petani, yang wajib membantu segala pekerjaan suami. Peran perempuan dalam aktivitas pertanian telah diabaikan dan mengakibatkan perempuan tidak masuk dalam perencanaan pembangunan pertanian (Elizabeth, 2007). Keadaan ini juga menyebabkan posisi perempuan semakin mengalami keterbatasan. Keterbatasan ini dialami perempuan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, keterbatasan perempuan tercermin pada lebih rendahnya pendidikan, keterampilan, rasa percaya akan kemampuan dan potensi diri perempuan. Sedangkan secara eksternal, keterbatasan tersebut tercermin pada lebih rendahnya akses wanita dalam menangkap berbagai peluang pekerjaan di luar rumah tangganya. Pada penelitian ini posisi perempuan dalam rumah tangga merupakan sumber daya dalam rumah tangga, yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani miskin.

2.3 Rumah Tangga Petani

Pengelompokan individu ke dalam suatu kategori tingkat kemiskinan sangat tergantung pada individu lain dalam rumah tangganya. Oleh karena itu meskipun kemiskinan merupakan atribut bagi individu, namun sangat terkait erat dengan kondisi rumah tangga. Melihat kondisi ini maka kemiskinan penduduk bisa dikelompokkan menjadi penduduk atau individu miskin dan rumah tangga miskin (BPS, 1991). Dimana kemiskinan rumah tangga dengan kemiskinan individu memiliki keterkaitan. Oleh karena itu kemampuan rumah tangga itu sendiri tidak terlepas dari perbandingan jumlah anggota rumah tangga yang menjadi beban dan penyumbang pendapatan

Persoalan kemiskinan sangat terkait dengan bagaimana masyarakat mampu bertahan hidup dan keluar dari kemiskinannya. Untuk itu diperlukan berbagai kekuatan sebagai sarana utama untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Jika berbagai kekuatan ini tidak dimiliki keluarga yang mengakibatkan ekonomi keluarga runtuh maka kemiskinan akan sedikit demi sedikit memasuki kehidupan rumah tangga. Pandangan ini ada dalam pemahaman Friedman (1979) mengenai kemiskinan yang menurut pandangannya kemiskinan adalah persoalan ketidaksamaan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial.

Pemahaman Friedman tentang kemiskinan menjadikan ekonomi rumah tangga sebagai pusat kekuatan sosial, yang dilihat melalui akses rumah tangga yang dapat diukur dan dibandingkan. Pada rumah tangga miskin rendahnya akses mengakibatkan keluarga kekurangan kekuatan sosial untuk memperbaiki kondisi kehidupan anggotanya. Friedman mengemukakan adanya delapan dasar kekuatan sosial sebagai sarana dasar yang tersedia dalam ekonomi rumah tangga untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, yaitu ;

1. Ruang hidup, mempertahankan ruang hidup merupakan dasar wilayah ekonomi rumah tangga. Pertahanan hidup mencakup ruang fisik dimana anggota rumah tangga memasak, makan, tidur dan jaminan perlindungan terhadap barang-barang milik pribadi. Dengan pengertian yang lebih luas merupakan pertahanan akan rumah yang disosialisasikan sebagai tempat aktivitas dukungan mempertahankan rumah tangga.

2. Waktu luang, merupakan waktu yang tersisa diluar waktu yang diperlukan untuk menambah pekerjaan atau penghasilan
3. Pengetahuan dan Keterampilan, merupakan tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan khusus. Hal ini merupakan hal yang penting dalam ekonomi rumah tangga untuk lebih memberikan keuntungan dan mempertinggi prospek jangka panjang ekonomi rumah tangga
4. Informasi yang tepat, informasi yang akurat dan rasional diperlukan terutama yang berkaitan dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya.
5. Organisasi sosial, merupakan organisasi formal maupun informal yang berasal dari keluarga
6. Jaringan sosial, rumah tangga merupakan jaringan kerja horizontal yang luas berkaitan dengan kekerabatan atau keluarga, teman, maupun tetangga. Jaringan sosial ini juga dapat menjadi jaringan kerja vertikal melewati tingkatan sosial untuk memperbaiki adanya perubahan rumah tangga dengan kekuatan. Jaringan sosial ini juga berkaitan dengan ada ketergantungan pada hubungan patron klien.
7. Sarana dalam pekerjaan dan lingkungan, rumah tangga merupakan alat produksi bagi rumah tangga, dan memberikan semangat yang kuat untuk produksi
8. Sumber keuangan, rumah tangga menjadi jaringan pendapatan keuangan baik secara formal dan informal melalui kredit.

Pandangan Friedman memperlihatkan adanya delapan kekuatan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kedelapan kekuatan sosial ini akan saling berkaitan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Tidak optimalnya salah satu atau lebih kekuatan sosial akan menyebabkan rumah tangga mengalami permasalahan. Rumah tangga miskin umumnya ditandai dengan kurang optimalnya salah satu atau lebih kekuatan sosial dalam mendukung aktivitas ekonomi rumah tangganya.

Pada kehidupan masyarakat perdesaan pertahanan ruang hidup justru menjadi salah satu kekuatan sosial yang kurang optimal dimiliki sebagai sarana dasar ekonomi rumah tangga petani. Kemampuan para petani untuk

mempertahankan asset ekonomi berupa lahan pertanian di tengah proses industrialisasi bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini terlihat dari semakin sedikitnya masyarakat desa yang memiliki lahan pertanian di perdesaan. Pemilik lahan pertanian yang luas saat ini lebih banyak dikuasai oleh sebagian kecil petani pemilik modal. Dengan kurang optimalnya kekuatan sosial yang dimiliki rumah tangga petani maka secara otomatis penduduk perdesaan mulai mengalami kemiskinan. Rumah tangga petani di perdesaan lebih mengandalkan pendapatannya dari upah buruh atau pembagian hasil tanah garapan, yang tentunya memberikan pendapatan yang jauh lebih rendah, daripada pendapatan yang diperoleh dari tanah milik sendiri.

Tidak dimilikinya lahan pertanian oleh sebagian besar petani di perdesaan mengakibatkan pekerjaan utama rumah tangga petani miskin di desa umumnya adalah sektor informal di pertanian. Sektor informal sendiri merupakan sektor usaha yang terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil. Pekerjaan pada sektor informal ini menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri. Berbagai kendala ditemukan dalam menjalankan pekerjaan sektor informal ini, seperti faktor modal, fisik, faktor pengetahuan, maupun keterampilan (Sethurman dalam Hidayat, 1988). Pekerjaan sektor informal ini juga memperlihatkan adanya kondisi keterbelakangan baik dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, maupun perencanaan ruang. Dari dimensi ekonomi ditunjukkan dengan hampir semua pekerja ini mengabaikan faktor modal, investasi, keterampilan, depresiasi, dan sebagainya. Jika dilihat dari dimensi sosial, mereka masih mengandalkan pekerja keluarga, adanya suasana hubungan patron klien, jam kerja yang tidak menentu, dan bersifat kedaerahan. (Wirosardjono, 1985)

Ciri lain dari rumah tangga petani selain bekerja di sektor informal menurut Chayanov (dalam Syahyuti, 2006). adalah penggunaan tenaga kerja keluarga dalam usaha pertaniannya. Penggunaan tenaga kerja keluarga ini bukan untuk mengejar keuntungan yang besar, namun untuk mencapai kesejahteraan anggota rumah tangga (Syahyuti, 2006). Dalam hal ini unsur-unsur biaya produksi yang terdapat dalam aktivitas ekonomi sektor pertanian tidak dapat

diperbandingkan dengan apa yang terdapat dalam perekonomian kapitalis, dimana pemupukan modal menjadi faktor terpenting.

Akibat tidak bertujuan pada pemupukan modal, seringkali pendapatan yang didapat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga petani. Pendapatan yang tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup mendorong rumah tangga miskin melakukan berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangganya. Penjelasan cara yang digunakan oleh rumah tangga miskin untuk bisa bertahan dikemukakan oleh James C. Scott (Suyanto, 1996). Menurutnya ada tiga cara yang digunakan rumah tangga untuk mempertahankan rumah tangganya, yaitu :

1. Mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan makan hanya sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah
2. Menggunakan alternatif subsisten yaitu swadaya yang mencakup kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai buruh lepas, atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Cara ini dapat melibatkan seluruh sumber daya yang ada di dalam rumah tangga miskin, terutama istri sebagai pencari nafkah tambahan bagi suami
3. Meminta bantuan dari jaringan sosial seperti sanak saudara, kawan-kawan sedesa, atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya (patron), dimana ikatan patron dan kliennya (buruh) merupakan bentuk asuransi dikalangan petani. Patron menurut definisinya adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Patron dalam kehidupan petani adalah pemilik modal yang dapat membantu kesulitan keuangan yang dihadapi petani.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di perdesaan Jawa Timur memperlihatkan beberapa cara yang dikembangkan penduduk miskin dalam menghadapi persoalan ekonominya, tanpa harus berpindah tempat (Suyanto,1996), yaitu dengan cara :

1. Mengencangkan ikat pinggang dengan menyederhanakan menu makanan sehari-hari. Yang dimaksud dengan menyederhanakan disini adalah bentuk pengurangan anggaran belanja harian terutama untuk makan dan pengurangan uang jajan untuk anak dan orang tua, atau kembali ke pola subsisten, yakni

mencari lauk pauk makanan dari bahan-bahan tanaman disekitarnya yang tidak harus membeli

2. Mencari sumber penghasilan alternatif yang sekiranya bisa memberikan pendapatan meski mungkin hasil yang diperoleh tidak begitu besar
3. Mengerahkan anggota keluarga yang ada untuk melakukan diversifikasi usaha, anggota keluarga yang umumnya sering menjadi alternatif tempat bergantung adalah kaum ibu dan anak yang dirasa sudah cukup umur
4. Meminta bantuan pada sistem penunjang yang ada disekitarnya, khususnya dengan cara meminta tolong kepada orang tua, anak, atau teman. Bentuk hubungan *patronage* dan rasa solidaritas yang masih relative kuat adalah pranata sosial setempat yang banyak membantu proses adaptasi keluarga penduduk miskin dalam mengantisipasi tekanan ekonomi yang menimpanya.

Terdapat kesamaan dari apa yang dijelaskan oleh James C. Scott dengan apa yang ditemukan dari hasil penelitian rumah tangga perdesaan di Pulau Jawa mengenai bagaimana rumah tangga miskin diperdesaan dapat bertahan menghadapi persoalan ekonomi rumah tangganya. Adapun cara-cara yang digunakan meliputi pengaturan pengeluaran untuk pangan, pemanfaatan sumber daya rumah tangga, pencarian alternatif pekerjaan, dan meminta bantuan pada jaringan sosial yang dimilikinya. Bila dihubungkan dengan penjelasan mengenai kekuatan sosial rumah tangga menurut Friedman maka sesungguhnya cara yang dilakukan adalah untuk mengoptimalkan kekuatan sosial yang dimiliki rumah tangga. Penelitian ini juga akan melihat cara-cara rumah tangga menurut James C. Scott untuk mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan rumah tangga petani miskin di Desa Cisaat dalam mengatasi persoalan ekonomi.

Cara yang dilakukan oleh rumah tangga miskin dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya oleh White dikelompokkan kedalam tiga tipe strategi rumah tangga (Alexander,1991), yaitu :

1. *survival*, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tingkatan minimum dan hanya dapat bertahan hidup dalam konteks pertanian, hal ini sering digunakan oleh buruh tuna kisma yang marginal.
2. konsolidasi, dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam mencapai kebutuhan pokok dan sosial digunakan oleh rumah tangga petani lemah yang

dapat menutupi kebutuhan subsisten dari usaha pertanian tetapi masih mencari perlindungan untuk menghadapi resiko dan untuk memperbesar sumber daya (*resource base*)

3. akumulasi, dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam mencapai kebutuhan pokok, sosial, dan pemupukan modal terutama bagi rumah tangga kaya dalam mencari laba dari investasi yang dilakukan

Ketiga upaya ini menurut White tidak selalu muncul dalam setiap komunitas. Terkadang ditemukan suatu kelompok yang tidak melakukan strategi yang tidak sesuai dengan status sosial ekonominya sementara adapula yang melakukan lebih dari satu tipe. Kesemuanya itu tergantung pada kestabilan rumah tangga. (Alexander, 1996). Upaya yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah pada tipe *survival* dan konsolidasi. Hal ini dikarenakan upaya akumulasi menurut White cenderung dilakukan pada rumah tangga kaya, sehingga kurang tepat dilihat dalam penelitian ini yang lebih melihat pada rumah tangga petani miskin.

Upaya yang dilakukan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya tidak dapat dilepaskan dari kemampuan rumah tangga petani miskin dalam mengoptimalkan seluruh kekuatan sosial yang dimilikinya. Untuk dapat mengoptimalkan kekuatan sosial yang dimiliki maka rumah tangga petani harus diperdayakan. Pemberdayaan rumah tangga petani diperlukan sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas akses terhadap suatu kondisi. Pemberdayaan rumah tangga bertujuan untuk mendorong kemandirian, tanggap, dan kritis terhadap perubahan, serta mampu berperan aktif dalam menentukan nasibnya sendiri. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penciptaan peluang yang seluas-luasnya agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat (Sumodiningrat, 1999). Konsep pemberdayaan pada penelitian ini lebih melihat pada kemampuan individu, khususnya sumber daya dalam rumah tangga petani miskin, untuk memiliki kekuatan atau kebebasan dalam :

- a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan

b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diinginkan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya (Suharto, 1997).

